

# KARTU ABSENSI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Septi Dwi Handayani

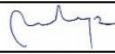
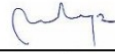
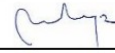
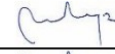
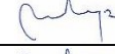
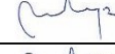
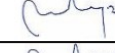
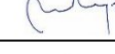

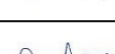
NIM 20170502057

Notelp 0877 7769 4779

e-mail septidwh@gmail.com

Judul/Thema **PERAN HUMAS DALAM MENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Pembimbing Muh. Ruslan Ramli, S.Sos., M.Si., Ph.D

No	Tanggal	Bab	Catatan Pembimbing	TTD Pembimbing
1	8 April 2021		Membahas pedoman jurnal	
2	16 April 2021	4	Membahas bab 4 lanjutan dari sempro	
3	27 April 2021	4	Mengajukan transkrip pertanyaan wawancara	
4	22 Juni 2021	4	Membahas bab 4	
5	5 Juli 2021	4	Revisi bab 4	
6	12 Juli 2021	4	Revisi bab 4, boleh lanjut bab 5	
7	19 Juli 2021	4 & 5	Acc bab 4, revisi bab 5	
8	25 Juli 2021	5	Revisi bab 5	
9	2 Agustus 2021		Pengecekan format jurnal	
10	5 Agustus 2021		Acc jurnal	

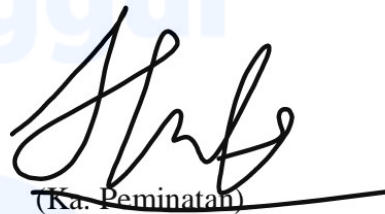
Syarat maju sidang, minimal 10x pertemuan/pembimbingan.

Mahasiswa,



Septi Dwi Handayani

Mengetahui,



(Ka. Peminatan)

## Transkrip Pertanyaan Wawancara

Key Informan: Bapak Budi J.P Waskito selaku Kepala Sub Bagian Anstrakom Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Bagaimana aktivitas humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan apa saja?  
Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan hubungan masyarakat (humas) dan keprotokolan di lingkungan Ditjenpas yaitu, pelaksanaan urusan humas, pengelolaan urusan publikasi, serta pelaksanaan keprotokolan dan tata usaha pimpinan.
  
2. Apa saja tugas dan peran dari bagian humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan?  
Bagian Humas dan Protokol terdiri atas tiga subbagian: (1) Subbagian Analisis dan Strategi Komunikasi; (2) Subbagian Publikasi; dan (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.
  - Subbag Analisis dan Strategi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis informasi, strategi komunikasi massa dan promosi, serta penggalangan citra positif Pemasyarakatan (khususnya Ditjenpas);
  - Subbag Publikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan, penyiapan bahan pengelolaan berita, pengelolaan informasi, publikasi, dan dokumentasi di lingkungan Ditjenpas;
  - Subbag TU Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pendistribusian persuratan, pengelolaan arsip dan dokumen, tata usaha pimpinan, pengamanan pimpinan, pengelolaan kegiatan seremonial dan keprotokolan di lingkungan Ditjenpas.

Peran Humas Ditjen Pemasyarakatan:

- Humas Ditjen Pemasyarakatan berperan sebagai komunikator, mempublikasikan informasi dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, baik itu melalui media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media daring, website, dan media sosial. Sebagai komunikator humas wajib membangun hubungan baik dengan media massa misalnya dengan melakukan media gathering, updating issue, dan membangun hubungan personal yang baik dengan media massa sehingga diharapkan media dapat memberitakan kinerja Pemasyarakatan secara positif.

- Humas juga mempunyai peran sebagai fasilitator dalam menyerap opini dan isu yang berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai masukan dan rekomendasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, hal ini dilakukan dengan melaksanakan media monitoring, analisa berita dan strategi komunikasi.
  - Melakukan publikasi, seperti ada kegiatan apa atau informasi yang berkaitan dengan pemasyarakatan dipublikasikan melalui media massa yang kita gunakan
  - Edukasi dan sosialisasi ke WBP ataupun masyarakat terkait program ataupun kebijakan yang ada, contohnya sekarang ini covid-19 semakin merebak kita harus memberikan edukasi yang baik kepada WBP maupun masyarakat tentang protokol Kesehatan
  - Bersinergi antar team untuk mensukseskan pemasyarakatan
3. Media apa saja yang digunakan bagian humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendistribusikan informasi? Dan siapa yang bertanggung jawab?
- Media sosial (official Instagram, Twitter, Facebook, YouTube)
  - Website [www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id)
  - Videotron yang dipasang di depan kantor Ditjenpas
  - Warta Pemasyarakatan
4. Sejauh mana peran Cyber PR (web, media sosial) dapat membantu menyebarkan informasi publik?
- Dengan kondisi saat ini, peran media sosial dalam penyebaran informasi menjadi sangat penting dan bahkan menjadi media yang efektif dan cepat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Begitu pula Ditjenpas, sejak maraknya penggunaan *new media*, Ditjenpas berusaha memaksimalkan media sosial dan media baru untuk menyebarluaskan informasi Pemasyarakatan yang mudah diakses oleh publik.
5. Bagaimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengelola informasi kepada publik?
- Peranannya sama seperti yg diatas sebenarnya, selain itu peranannya juga melakukan publikasi, seperti ada kegiatan apa atau informasi yg berkaitan dengan pemasyarakatan dipublikasikan melalui media massa yg kita gunakan ; melakukan edukasi dan sosialisasi terkait program ataupun kebijakan yg ada, contohnya sekarang ini covid-19 semakin merebak kita harus memberikan edukasi yg baik kepada WBP maupun

masyarakat tentang protokol kesehatan ; melakukan sinergi antar team untuk mensukseskan pemasyarakatan.

- Layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) secara *offline* (datang langsung) dan *online* melalui website PPID, fitur DM media sosial, dan email;
- Jenis-jenis informasi: kinerja Pemasyarakatan, permohonan informasi WBP, permohonan informasi penelitian, permohonan magang, permohonan izin liputan, dll.

6. Bagaimana pengelolaan website dan media sosial Direktorat Jenderal Pemasyarakatan?  
Website dan media sosial dikelola oleh tim publikasi dan anstrakom sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ada. Tim Anstrakom bertindak dalam penyusunan strategi komunikasi dan tim publikasi yang melakukan produksi dan publikasi di media.
7. Bagaimana intensitas pengunjung media online Direktorat Jenderal Pemasyarakatan?  
Pengunjung media sosial secara umum cukup tinggi. Instagram memiliki jumlah pengikut lebih dari 30 ribu, Twitter 32 ribu, dan YouTube 13 ribu subscriber.
8. Apa saja kendala atau hambatan humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengelola informasi kepada publik? Dan bagaimana cara mengatasinya?  
Masih adanya SDM yang mempunyai latar belakang Pendidikan yang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi kehumasan. Mengatasi kendala tersebut dilakukan dengan adanya pelatihan dan in house training yang juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten di bidangnya.
9. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai informasi yang dishare melalui website maupun media sosial?  
Evaluasi selalu dilakukan secara terus menerus baik yang sifatnya rutin maupun insidental pada kasus tertentu

## **Transkrip Pertanyaan Wawancara:**

Informan: Ibu Pravithea selaku Pranata Humas Ahli Pertama di Sub Bagian Anstrakom Humas Direktorat Jenderal Pemasarakatan

1. Apa saja tugas dan peran dari bagian humas Direktorat Jenderal Pemasarakatan?
  - Subbag Analisis dan Strategi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis informasi, strategi komunikasi massa dan promosi, serta penggalangan citra positif Pemasarakatan (khususnya Ditjenpas);
  - Subbag Publikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan, penyiapan bahan pengelolaan berita, pengelolaan informasi, publikasi, dan dokumentasi di lingkungan Ditjenpas;
  - Subbag TU Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pendistribusian persuratan, pengelolaan arsip dan dokumen, tata usaha pimpinan, pengamanan pimpinan, pengelolaan kegiatan seremonial dan keprotokolan di lingkungan Ditjenpas.
2. Apa saja dan bagaimana peran humas Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam mengelola informasi kepada publik?

Simplenya di humas ada yg namanya anstra yg mencari dan mengolah isu-isu yg lagi beredar di publik tentang pamasarakatan, kalau misalnya itu positif atau benar ya kita akan mengeluarkan data untuk mendukung isu itu, kalau misalnya isu-isu itu negatif atau miring ya kita rumuskan mau di konturkahkan atau di diemin, karena kan ada isu-isu yg miring yg tidak perlu ada pembelaan, selain itu inikan lebih ke konten ya outputnya, nah kalau output yg selain konten itu misalnya ada permohonan informasi masyarakat, entah itu datang langsung, via email, via medsos, atau via telfon itu ranahnya ke PPID itukan ada di ranahnya humas dimanapun instasi biasa PPID itu di humas itu kita terima nanti setelah kita terima baru kita baru kita pilah mana nih ranahnya masuk ke direktorat apa ya misalnya ada yg nanya tentang pengajuan remisi atau hak-hak integrasi atau pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau asimilasi berarti kita lempar ke bagian binapi latkepro kurang lebihnya setelah kita forward ke direktorat teknis terkait, nanti data dari mereka kita lagi yg sampaikan ke pemohon informasi untuk menjembatannya gitu.
3. Apa saja informasi yang diberitakan melalui website maupun media sosial Direktorat Jenderal Pemasarakatan?



Kalo website itu berisi tentang UPT dan wilayah kegiatan mereka apa saja kalo media sosial itu lebih ke kegiatan bersama yang ada di Ditektorat Jenderal Pemasarakatan.

4. Selain website dan media sosial, apakah ada media yang lain sebagai penunjang penyebaran / penyampaiaan informasi kepada masyarakat?

Ada, kita juga memakai majalah dalam menyampaikan informasi. Majalah yg sering digunakan disebut warta pemsarakatan yg fungsinya menyampaikan informasi tapi terkadang juga kita berhubungan dengan wartawan tetapi sesuai dengan kondisional kalau memang diperlukan ya kita mengundang media tersebut, sama kita juga biasa menggunakan videotron yg ada di depan Ditjen Pas.

5. Bagaimana garis kordinasi serta adakah aturan khusus dalam penyampaian pesan yang ingin disebar melalui website maupun media sosial Direktorat Jenderal Pemasarakatan?

Kalau koordinasi itu sesuai struktur aja sih kan Eselon satunya Dirjen nah dibawahnya Dirjen itu ada Eselon dua itu ada tujuh, satu sekretariat, enam direktur, nah kalau humas itukan dibawah sekretariat, jadi Eselon duanya Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan dibawah sesdit Ditjen Pas ada Kabag tapi lupa persisnya berapa salah satunya Kabag Humas, dibawah Kabag Humas ada tiga Kasubag yaitu Kasubag Anstrakom, Pulikasi, dan Protokol dibawah Kasubag ada staff masing-masing jadi rulesnya gitu aja sih. Biasanya dari Kabag ke Kasubag dulu lalu Kasubag merintahin siapa-siapanya dibawahnya yg misalnya ada tugas apa lalu yg ngerjain apa itu. Sebaliknya juga kalau misalnya kita yg staff-staffnya yg udah ngerjain sesuatu kabarinnya ke Kabag dulu atau Kasubag atau kalau memang diperlukan, aku pribadi biasanya cc kedua penaggung jawab tersebut tapi itu kondisional aja sih kadang juga dari Kabag suka langsung ke staff juga tanpa tau Kasubag dulu jika memang dibutuhkan.

Kalau aturan khusus penyampaian pesannya itu untuk di website setiap hari editing berita kiriman kontributor UPT dan Wilayah itu mereka ada rulesnya untuk kiriman berita kegiatan setiap hari isi berita minimal 200-250 kata karena biar tidak terlalu panjang karena sifatnya straight news dan nggak terlalu pendek juga karena yg mereka kirim itu masih kita edit jadi mungkin masih ada yg kita potong atau gimana terus standar straight news pada umumnya aja sih seperti apa gitu. Lalu harus up to date maksimal kirim berita itu dua hari setelah pelaksanaan kegiatan agar beritanya tidak

basi, menggunakan foto asli. Kalau medsos sendiri aturannya tergantung dari agenda setting yg kita buat selain itu juga dari permintaan pimpinan aja, lagi ingin memposting apa nanti kita olah sedemikian apa jadi sesuatu yg menarik. Aturannya standar aja sih seperti: caption tidak terlalu panjang kalau di instagram, kalau di facebook biasanya kita lebih detail, kalau di twitter biasanya bisa dibikin thread. So far sih kalau penggunaan bahasa masih baku kalau di official kadang juga diimbuhin beberapa kata yg nggak terlalu formal diakhirnya gitu sama yg paling penting adalah misalnya kita publish yg ada video atau foto yg ada muka WBP foto tahanan narapidana atau anak kalau foto biasanya kita blur mukanya, nah sekarang tuh kita ada rubik Instagram lensa pas itu kaya galeri foto-foto aja gitu dari yg kita ambil dari UPT itu juga kalau ada yg mengekspos WBP biasanya kita nggak terlalu dipajang gitu, ngambil dari sudut pandang yg dari samping, atau dari belakang gitu yg nggak keliatan muka itusih yg penting baik itu di pusat maupun di UPT dan wilayah kalau misalnya ublisch sesuatu yg berhubungan dengan WBP nggak diekspos mukanya karena itu identitas mereka kan kadang juga dibikin berita menggunakan inisial kecuali memang yg sudah konsen ke WBP nya dia mau disebut namanya ya gapapa.

6. Apa saja kendala atau hambatan humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengelola informasi kepada publik? Dan bagaimana cara mengatasinya?

Hambatannya so far sih masih tentang SDM yg benar-benar belum tepat sesuai dengan jobdesknya tapi sebenarnya nggak ada yg perlu di khawatirin tapi sih passionnya yg bener-bener dari PR cuma aku sama mba Irma sisanya kan ya based on pengalaman aja pengalaman yg non formal gitu yg beda cuma di basic aja gitu. Kendalanya tuh kadang-kadang disitu misalnya tuh kaya kita lagi mau liputan kan ya liputan tuh yg meliput bukan orang yg sesuai jobdesknya jadi agak terhambat disitu tapi so far kita masih bisa menanganinya.

7. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai informasi yang dishare melalui website maupun media sosial?

Adasih kita memang minimal setiap bulan ada rapat untuk evaluasi rutin dan juga kita ada tim nya sendiri untuk mengadakan evaluasi tersebut. Kalau tentang evaluasi tersebut mohon maaf sekali saya tidak berani untung ngomongnya.

8. Umpan balik/ feedback apa yang didapat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dari menyebarkan berita informasi yang disebarkan kepada masyarakat?  
Di Ditjen Pas tuh kan suka ada isi survey untuk menilai kepuasan masyarakat dan alhamdulillah feedbacknya sih selalu sangat baik.

**Dokumentasi berupa chatting menggunakan whatsapp serta video call whatsapp**

